



**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Februari 2025/Khusus - Akhir Menjabat)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PERTANIAN
UNIT KERJA : BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN PERTANIAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ASTHUTIIRUNDU
2. Jabatan : PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR
3. NHK : 922120

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 610.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 270 m2/270 m2 di KAB / KOTA KOLAKA, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 482 m2/105 m2 di KAB / KOTA KOLAKA, Rp. 400.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 22.000.000

1. MOTOR, YAMAHA YAMAHA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000
2. MOTOR, YAMAHA ST88 Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 11.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 58.260.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 4.223.113

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 694.483.113

III. HUTANG Rp. 131.375.416

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 563.107.697

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.